

Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pengaruhnya terhadap Sistem Sekolah Modern

***¹Chici Cahyaningrum, ²Nafisha Arifa Azahra, ³Wahyu Musrifah Ramadani,
⁴M.Hasbiyalloh Ghoutsul Bourdan, ⁵Ivo Sindia Nur Azizah**

^{1,2,3,4,5}Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email: *¹Chcn183@gmail.com, ²nafishaazahra062@gmail.com,

³wahyumusrifahramadhani@gmail.com, ⁴hasbym455@gmail.com, ⁵ivoazizah01@gmail.com

Abstract

Educational policy in Indonesia continuously evolves to address contemporary challenges and eliminate the discriminatory legacy of the colonial era. This study aims to analyze the historical development of educational policies in Indonesia and their influence on the modern school system, specifically regarding curriculum, quality standardization, decentralization, and funding. The method employed is qualitative through library research, with secondary data analyzed using content analysis techniques. The results indicate that the dualistic system of the colonial period triggered a structural transformation within traditional Islamic education, making it more adaptive. In the modern era, this transformation culminates in the implementation of Kurikulum Merdeka, which focuses on student-centered learning, and the transition of evaluation from the National Examination to the Computer-Based National Assessment (ANBK). Furthermore, decentralization policies initiated by Law No. 22 of 1999 and the optimization of funding through the School Operational Assistance (BOS) funds have proven to grant greater autonomy to regions and schools. However, challenges such as disparities in technological infrastructure, limited competence of educators, and inequalities in financial management between urban and rural areas remain major obstacles to achieving an equitable and inclusive educational ecosystem.

Keywords: *Educational Policy, Kurikulum Merdeka, National Assessment, Decentralization, BOS Fund*

Abstrak

Kebijakan pendidikan di Indonesia terus berevolusi demi menjawab tantangan zaman dan menghapus warisan diskriminatif era kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis kebijakan pendidikan di Indonesia serta pengaruhnya terhadap sistem sekolah modern, khususnya terkait aspek kurikulum, standarisasi mutu, desentralisasi, dan pendanaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), di mana data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dualistik masa kolonial memicu transformasi struktural pendidikan Islam tradisional menjadi lebih adaptif. Di era modern, transformasi ini memuncak melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang berpusat pada siswa (student-centered) dan transisi evaluasi dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Selain itu, kebijakan desentralisasi yang dipicu oleh UU No. 22 Tahun 1999 dan optimalisasi pendanaan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbukti memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah dan sekolah. Kendati demikian, tantangan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, dan ketimpangan tata kelola keuangan antara wilayah kota dan desa masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang merata dan inklusif.

Kata Kunci: *Kebijakan Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Asesmen Nasional, Desentralisasi, Dana BOS*



PENDAHULUAN

Pada masa Hindia Belanda, pendidikan diselenggarakan dengan tujuan utama mendukung kepentingan kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan yang bersifat diskriminatif melalui dualisme sekolah, yaitu pemisahan lembaga pendidikan berdasarkan status sosial dan ras. Sekolah-sekolah untuk golongan Eropa memperoleh fasilitas, kurikulum, dan kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan sekolah yang diperuntukkan bagi penduduk pribumi. Meskipun kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20 membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat pribumi, implementasinya tetap mempertahankan ketimpangan dan segregasi sosial dalam dunia pendidikan. Sistem tersebut secara tidak langsung menciptakan kelompok elite terdidik yang kemudian berperan dalam pergerakan nasional, namun juga meninggalkan warisan berupa stratifikasi pendidikan yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem pendidikan Indonesia selanjutnya (Nurhakim, 2024).

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah berupaya melakukan transformasi pendidikan nasional agar sesuai dengan cita-cita bangsa yang merdeka. Berbagai kebijakan pendidikan mulai dirancang, termasuk penyusunan Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Reformasi pendidikan ini bertujuan menghapus diskriminasi kolonial dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun demikian, perubahan kebijakan tidak sepenuhnya menghilangkan struktur pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial. Beberapa aspek seperti sistem persekolahan berjenjang, birokrasi pendidikan yang terpusat, orientasi akademik yang kuat, serta pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan masih menunjukkan jejak historis yang berasal dari masa kolonial (Nasution, 2020).

Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan Indonesia mengalami berbagai perubahan kurikulum dan kebijakan, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga Kurikulum Merdeka pada masa kini. Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pendidikan kolonial masih dapat ditemukan dalam praktik pendidikan modern, baik dalam aspek tata kelola sekolah, distribusi akses pendidikan, maupun persepsi masyarakat terhadap jenis dan jenjang



pendidikan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masa lalu memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, analisis historis mengenai evolusi kebijakan pendidikan menjadi relevan untuk memahami tantangan dan arah pengembangan pendidikan Indonesia saat ini (Madyan et al., 2025).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertumpu pada pengkajian histori kebijakan pendidikan serta dampaknya terhadap sistem persekolahan masa kini melalui penelaahan berbagai dokumen tertulis yang relevan. Adapun sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, kajian terdahulu, serta publikasi ilmiah lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian (Iii & Penelitian, 2023).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pencarian literatur dengan cara menelusuri, membaca, memilah, serta mencatat sumber-sumber yang relevan dari Google Scholar dan berbagai kanal akademik lainnya. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta keterkaitannya dengan fokus kajian. Setelah data terkumpul, peneliti mengelompokkan sumber-sumber tersebut menurut tema-tema utama yang berkenaan dengan evolusi kebijakan pendidikan dan sistem sekolah modern.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis). Data yang telah terkumpul kemudian direduksi, dikategorikan, dibandingkan antarsumber, dan selanjutnya ditafsirkan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pengaruh kebijakan pendidikan terhadap sistem sekolah modern. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan beragam literatur yang saling berkaitan dengan topik penelitian, sehingga hasil kajian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas Kebijakan Pendidikan

Pada periode awal kemerdekaan Indonesia (1945–1950-an), pendidikan Islam



melalui pesantren dan madrasah menjadi landasan ideologis dan kultural yang kuat dalam menyusun arah pendidikan nasional, yang dipertegas oleh peran aktif tokoh seperti KH. Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo dalam merumuskan pasal konstitusi. Lembaga ini terbukti adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah nasional ke dalam kurikulumnya, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam standardisasi. Nilai-nilai dasarnya seperti kejujuran, tanggung jawab, ukhuwah (persaudaraan), dan pengorbanan terbukti sukses mencetak tokoh nasionalis-religius yang aktif mengelola negara, selaras dengan tujuan UU Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Walaupun sempat diragukan relevansinya di era modern dan menghadapi kendala internal nyata seperti keterbatasan sarana-prasarana, minimnya tenaga pendidik profesional, serta ketimpangan kualitas antarmadrasah pendidikan Islam tetap tangguh bertransformasi berkat legitimasi sosial-spiritual yang kuat dari masyarakat. Sinergi antara nilai keagamaan dan semangat nasionalisme inilah yang akhirnya melahirkan karakteristik khas pendidikan Indonesia yang bersifat spiritual, humanis, dan patriotik (Haq, 2025).

Kebijakan pendidikan di era kolonial Belanda melahirkan sistem pendidikan yang bersifat dualistik, dengan pemisahan yang jelas antara jalur pendidikan bergaya Barat dan pendidikan Islam untuk kalangan pribumi. Berbagai aturan, seperti Goeroe Ordonantie dan regulasi mengenai sekolah liar, menunjukkan adanya pengawasan ketat dari pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam, terutama dalam aspek perizinan guru, penyusunan kurikulum, dan pengelolaan kelembagaan. Akibatnya, ruang gerak pendidikan Islam tradisional baik pesantren maupun lembaga keagamaan setempat menjadi sangat terbatas. Namun di sisi lain, tekanan kebijakan tersebut justru memicu respons positif dari komunitas Muslim dengan membentuk lembaga-lembaga pendidikan alternatif yang lebih terorganisasi. Dalam situasi ini, organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Sarekat Islam berperan penting dengan mengembangkan model pendidikan yang menggabungkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Madrasah modern serta sekolah-sekolah Islam pun mulai tumbuh sebagai wujud kompromi antara tuntutan kemodernan dan keinginan untuk mempertahankan identitas keislaman. Secara analitis, kebijakan kolonial tidak semata-



mata berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga bertindak sebagai pemacu yang mendorong terjadinya transformasi struktural dalam pendidikan Islam, sehingga sistemnya menjadi lebih adaptif dan terlembaga dengan baik (Syam et al., 2026).

Pendidikan Islam pada masa kolonial terbagi dalam lima bentuk utama. Pertama, sistem peralihan Hindu-Islam yang menyasar bangsawan dan keraton, serta sistem awal murid datang kepada guru untuk masyarakat awam. Kedua, pendidikan di surau/langgar tanpa jenjang kelas dengan sistem halaqoh menggunakan kitab kuning. Ketiga, metode sorogan di pesantren dengan pendekatan individual antara kyai dan santri. Keempat, metode wetonan/bandongan sebagai layanan kolektif dengan pendekatan ceramah. Kelima, metode musyawarah dalam bentuk seminar atau diskusi untuk santri tingkat lanjut yang menekankan partisipasi aktif. Kelima metode ini menjadi ciri khas sistem pendidikan Islam tradisional yang tetap bertahan di tengah tekanan dan pengawasan kolonial Belanda (Irwan et al., 2024).

Kedatangan kolonial Belanda membawa misi sekularisasi dan kristenisasi yang menekan pendidikan Islam melalui regulasi ketat, pengawasan lewat Priesterraden, hingga tindakan represif. Untuk bertahan dari diskriminasi sistem kolonial yang memisahkan kaum priyayi dan rakyat biasa, pesantren mulai mengadopsi sistem kelas modern (meja dan bangku) di samping model halaqah tradisional. Meskipun pesantren akhirnya cenderung mengisolasi diri hanya pada ilmu agama demi membendung pengaruh sekuler, lembaga ini tetap eksis dan gagal ditundukkan oleh kolonial. Saat Jepang berkuasa, pendekatan awal yang cenderung longgar berubah menjadi militeristik dan penuh indoktrinasi seiring memanasnya Perang Dunia II, yang memicu kemerosotan mutu pendidikan Islam. Warisan dualisme antara "Sekolah Kolonial" dan "Pesantren" ini terus bertahan hingga pascakemerdekaan, di mana pengelolaan pendidikan terbagi antara Departemen Pendidikan untuk sekolah umum dan Departemen Agama (sejak 1946) untuk madrasah swasta. Pada masa itu, peran Departemen Agama masih terbatas pada pengawasan madrasah yang dibagi menjadi dua jenjang: Tingkat Rendah (4 tahun) dan Lanjutan (3 tahun) (Fuad Raya, 2018).

Kurikulum dan Standarisasi Nasional sebagai Pengendali Mutu

Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia mencerminkan adanya pergeseran cara pandang terhadap hakikat tujuan pembelajaran. Pada fase awal,



kurikulum lebih berorientasi pada penguasaan materi dengan menjadikan guru sebagai tokoh utama dalam proses belajar-mengajar (teacher-centered learning), sehingga kegiatan pembelajaran lebih didominasi oleh penyampaian informasi dan penghafalan konsep. Namun, seiring dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan kebutuhan akan kompetensi abad ke-21, terjadi perubahan mendasar yang mengarah pada pendekatan yang lebih memprioritaskan peserta didik (student-centered learning). Hal ini tampak dari perubahan fokus kurikulum nasional yang tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan kompetensi, pembentukan karakter, daya kreatif, serta kemampuan beradaptasi siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Ummah, Sayekti, dan Yusuf (2026), perubahan kurikulum di Indonesia adalah respons terhadap dinamika sosial, politik, dan perkembangan pedagogi yang terus mengalami kemajuan.

Transformasi ini mencapai puncaknya melalui penerapan Kurikulum Merdeka, yang menonjolkan keluwesan proses belajar, penyesuaian terhadap keragaman kebutuhan siswa, serta penanaman nilai-nilai karakter melalui konsep Profil Pelajar Pancasila (Pedagogis, 2026). Kurikulum Merdeka hadir sebagai representasi nyata dari pergeseran fundamental dalam pendekatan pendidikan nasional, di mana ruang gerak yang lebih luas diberikan kepada satuan pendidikan dan para guru untuk merancang serta mengelola proses pembelajaran yang benar-benar selaras dengan karakteristik, minat, dan tahap perkembangan peserta didik. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung bersifat kaku, terstruktur secara ketat, dan lebih fokus pada target penuntasan materi ajar dalam periode waktu tertentu, Kurikulum Merdeka justru mengusung semangat pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Penekanan diberikan pada penguatan kompetensi-kompetensi esensial yang benar-benar dibutuhkan peserta didik, penerapan model pembelajaran berbasis proyek yang mendorong keterlibatan aktif, serta pengasahan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas sebagai bekal menghadapi kompleksitas kehidupan.

Dengan orientasi yang demikian, kurikulum modern tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumen administratif yang memuat daftar materi pelajaran, melainkan bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kapasitas, ketangguhan, dan daya saing peserta didik dalam menyikapi tantangan zaman yang terus berubah. Sejalan dengan pandangan para peneliti, Kurikulum Merdeka diartikan sebagai sebuah



terobosan baru yang membuka arah bagi pendidikan Indonesia, dengan memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk mendesain pengalaman belajar yang lebih otentik, responsif, dan selaras dengan kebutuhan individu serta potensi unik yang dimiliki setiap siswa. Dengan demikian, perubahan paradigma kurikulum yang terjadi bukanlah sekadar pergantian kebijakan teknis, melainkan merupakan cerminan dari kesungguhan pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, humanis, dan berpusat pada pertumbuhan holistik peserta didik sepanjang hayat (Diah Anisa et al., 2025).

Di samping berbagai perubahan yang terjadi dalam ranah kurikulum, upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia juga ditempuh melalui penerapan kebijakan standarisasi nasional yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Salah satu wujud nyata dari kebijakan tersebut tampak dalam sistem evaluasi pendidikan, yang kini mengalami transformasi signifikan—yakni beralih dari model ujian yang semata-mata berorientasi pada penilaian hasil akhir atau capaian kognitif peserta didik, menuju pendekatan asesmen yang lebih berperan sebagai instrumen pemetaan, refleksi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas proses pembelajaran itu sendiri. Pada masa sebelumnya, Ujian Nasional memegang posisi sentral sebagai tolok ukur utama keberhasilan akademik siswa, sehingga hasil ujian kerap dijadikan satu-satunya indikator pencapaian pendidikan. Namun, seiring waktu, pendekatan tersebut dinilai memiliki keterbatasan karena tidak mampu merepresentasikan secara utuh dan komprehensif seluruh dimensi kualitas pendidikan, termasuk aspek proses, karakter, dan iklim belajar di sekolah.

Untuk merespons kelemahan tersebut, pemerintah kemudian menginisiasi pengembangan Asesmen Nasional sebagai bentuk pembaruan sistem evaluasi. Asesmen ini dirancang tidak hanya untuk mengukur kompetensi dasar peserta didik dalam literasi dan numerasi, tetapi juga untuk menangkap potret karakter siswa serta menilai kualitas lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang mereka di satuan pendidikan. Para peneliti memandang bahwa Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) hadir sebagai instrumen yang strategis dalam evaluasi mutu pendidikan, karena mampu menghasilkan data yang kaya, objektif, dan terukur. Data tersebut tidak hanya berguna



untuk memetakan tingkat kualitas masing-masing satuan pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat sasaran guna mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan (Sulistiawati, 2025).

Penerapan kebijakan Asesmen Nasional tidak sekadar mengubah instrumen evaluasi, tetapi juga membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pembentukan kultur atau budaya belajar yang berkembang di lingkungan sekolah. Para guru tidak lagi terpaku pada upaya mengejar nilai ujian semata sebagai indikator keberhasilan utama, melainkan mulai diarahkan untuk merancang dan menghadirkan proses pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*), penguatan kemampuan literasi dan numerasi, serta pembinaan karakter peserta didik secara terintegrasi.

Dalam konteks ini, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Asesmen Nasional juga dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai cermin diri sebuah bahan refleksi yang berharga untuk mengidentifikasi secara objektif berbagai kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek proses pembelajaran maupun dalam ekosistem pendukungnya, sekaligus menjadi pijakan dalam menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat dan terarah. Meskipun demikian, sebaik apa pun instrumen evaluasi yang digunakan, efektivitas kebijakan ini pada akhirnya tetap sangat bergantung pada sejauh mana kapasitas dan kesiapan masing-masing sekolah dalam memahami data hasil asesmen, serta kemampuannya untuk menerjemahkan data tersebut menjadi langkah-langkah perbaikan yang konkret di lapangan.

Di sisi lain, para peneliti menyoroti bahwa meskipun Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) terbukti mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan sistematis, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan, seperti terbatasnya ketersediaan infrastruktur teknologi di sebagian daerah, serta masih rendahnya kemampuan literasi data di kalangan tenaga pendidik dan pengelola satuan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan standarisasi nasional tidak boleh dimaknai hanya sebagai alat pengendali mutu yang bersifat prosedural semata, melainkan harus diiringi secara simultan dengan program pendampingan yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas institusi sekolah



secara holistik. Hanya dengan cara itulah hasil evaluasi dapat benar-benar memberi dampak nyata dan bermakna terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Sulistiawati, 2025).

Kebijakan Desentralisasi, Pendanaan, dan Digitalisasi di Era Sekolah Modern

Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yang dimulai sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, mengubah sistem pendidikan yang semula sentralistik-birokratis menjadi lebih mandiri. Pengalihan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan lembaga pendidikan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan globalisasi, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dan sekolah diberikan fleksibilitas penuh untuk mengelola anggaran, menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal, serta merancang proses pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Otonomi ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemerataan akses, transparansi, serta partisipasi aktif warga lokal dalam pengawasan pendidikan.

Dalam implementasinya di tingkat satuan pendidikan, desentralisasi diwujudkan melalui otonomi sekolah yang memberikan kebebasan dalam mengelola fasilitas, siswa, hingga manajemen tenaga pendidik. Peran kepala sekolah menjadi sangat krusial sebagai pemimpin manajerial yang harus adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan anggaran. Meski membawa harapan besar, desentralisasi masih menghadapi tantangan berat berupa ketimpangan infrastruktur dan kesiapan sumber daya antardaerah, belum optimalnya kapasitas tenaga pendidik, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan kesenjangan kualitas antardaerah masih tinggi dan capaian internasional Indonesia masih tertinggal di Asia Tenggara. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat, serta program pelatihan intensif bagi guru agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan secara inklusif, responsif, dan bermutu tinggi (Yusuf & Hanif, 2025). Desentralisasi telah terbukti menjadi salah satu strategi yang ampuh dan efektif dalam upaya meningkatkan pemerataan distribusi alokasi dana pendidikan di berbagai wilayah. Melalui sistem desentralisasi, seperti yang diterapkan di Finlandia, pemerintah daerah diberikan



kewenangan yang cukup luas untuk mengelola dan menyalurkan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan spesifik serta karakteristik unik masing-masing wilayah. Pendekatan ini memberikan jaminan bahwa setiap daerah memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana berdasarkan prioritas lokal yang paling mendesak, misalnya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki infrastruktur sekolah, atau mengadakan program pengembangan dan pelatihan bagi tenaga pendidik agar kompetensi mereka terus meningkat. Dengan adanya keleluasaan tersebut, kebijakan pendidikan tidak lagi bersifat seragam dari pusat, melainkan lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih tepat guna, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di tingkat lokal (Suherman, 2025).

Pendidikan merupakan proses universal yang senantiasa hadir dalam setiap aspek kehidupan manusia, tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Setiap individu berhak memperoleh akses pendidikan yang setara, karena pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan generasi maupun kemajuan suatu bangsa. Kebijakan politik di bidang pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan yang layak. Salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan anggaran yang memadai, yang berfungsi sebagai masukan instrumental dalam mendukung seluruh rangkaian proses pembelajaran. Berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai instrumen bantuan finansial untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan Dana BOS pada tahun 2021, yang sekaligus menjadi kebijakan ketiga dalam kerangka konsep Merdeka Belajar, serta menyoroti berbagai kontroversi yang menyertainya. Kebijakan Dana BOS 2021 memicu perdebatan publik, terutama terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan dan analisis data (Hestina & Melinda, 2022). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi fondasi utama pembiayaan pendidikan dasar di



Indonesia, Tujuannya meringankan beban biaya masyarakat dan memperluas akses pendidikan. BOS mencakup biaya operasional, administrasi, hingga pengembangan pembelajaran. Di sekolah negeri, terutama di wilayah ekonomi lemah, BOS menjadi satu-satunya sumber keuangan utama sehingga perannya sangat krusial bagi keberlangsungan sistem pendidikan dasar. Kapasitas kepala sekolah dan tim pengelola anggaran menjadi penentu keberhasilan optimalisasi BOS. Sekolah dengan kepala sekolah yang paham manajemen keuangan dan perencanaan strategis cenderung lebih efektif mengalokasikan dana. Pelatihan rutin, tim profesional, dan keterbukaan terhadap inovasi menjadi ciri sekolah yang menjadikan BOS sebagai alat peningkat mutu. Kesenjangan pelatihan pengelolaan BOS antara kota dan desa menjadi temuan penting. Sekolah perkotaan lebih mudah mengakses pelatihan, sedangkan daerah terpencil banyak yang belum mendapat bimbingan. Hal ini mempengaruhi kemampuan menyusun RKAS, membuat laporan, dan memahami efisiensi anggaran. Pemerataan pelatihan dan pendampingan mutlak diperlukan agar kualitas pengelolaan BOS tidak timpang antarwilayah (Julia & Ahmad, 2025).

KESIMPULAN

Evolusi kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran mendasar dari sistem kolonial yang diskriminatif dan dualistik menuju sistem modern yang lebih inklusif dan adaptif. Tekanan regulasi era kolonial pada masa lalu justru menjadi pemacu bagi pendidikan Islam untuk bertransformasi dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum, sehingga eksistensinya tetap kokoh sebagai landasan ideologis bangsa hingga pascakemerdekaan. Di era sekolah modern, sistem pendidikan nasional berhasil beralih dari model pembelajaran kaku yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran kontekstual yang berpusat pada siswa melalui Kurikulum Merdeka. Pengendalian mutu pun mengalami perbaikan signifikan dengan transisi dari Ujian Nasional ke Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang lebih mengutamakan pemetaan dan refleksi proses belajar secara komprehensif.

Di samping itu, pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan optimalisasi program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah memberikan fleksibilitas serta otonomi yang besar bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam mengelola anggaran maupun kurikulum lokal. Peran kepala sekolah kini menjadi

sangat krusial dalam menentukan keberhasilan strategi pembiayaan dan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar tersebut. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan berat berupa ketimpangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi data di kalangan pendidik, serta kesenjangan kapasitas pengelolaan anggaran antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Hambatan ini menyebabkan kualitas pendidikan antardaerah belum merata dan capaian internasional Indonesia masih tertinggal di Asia Tenggara. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat mutlak diperlukan agar tujuan pendidikan nasional yang responsif dan inklusif dapat tercapai sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Anisa, Lailatul Qodriyah, Windi Nurohmatul Azizah, & Muhammad Hufon. (2025). Menelaah Kurikulum Merdeka sebagai Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *Chatra: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 27-36. <https://doi.org/10.62238/chatra.v3i1.185>
- Fuad Raya, K. (2018). "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru)." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8.2, 2581-0065. <http://www.ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/202%0Ahttps://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/202/119>
- Haq, I. A. (2025). Pendidikan Islam di Masa Awal Kemerdekaan Indonesia: Peran Sejarah dalam Membentuk Identitas Pendidikan Nasional. *Tarikh : Journal of Islamic History and Civilization*, 1(2), 118-134. <https://doi.org/10.61630/tjihc.v1i2.8>
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(1), 25-29. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2023). Indriyani, 2023 Analisis Tantangan Guru Paud Dalam Melaksanakan Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 28-34.
- Irwan, I., Ishomuddin, I., & Faridi, F. (2024). Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di Masa Kolonial Belanda. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 118-134. <https://doi.org/10.47625/fitrah.v15i2.631>
- Julia, A. N., & Ahmad, M. (2025). Analisis Studi Literatur: Strategi Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Dasar Berkualitas. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2 SE-Articles), 728-739. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/625>
- Madyan, Nada, Fitri, Mery, & Fahria. (2025). Perbandingan Historis Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Pendidikan Indonesia Masa Kini. *IHSAN: Jurnal*



- Pendidikan Islam, 3(4), 856-862. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.1711>
- Nasution, A. H. (2020). Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 Dan Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Pasca Kemerdekaan 1945 “ 1950. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 516-526. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v12i2.40221>
- Nurhakim, H. A. N. (2024). The Sistem Pendidikan Hindia Belanda Pada Masa Kebijakan Politik Etis. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), 52-69. <https://doi.org/10.21009/jps.131.03>
- Pedagogis, I. (2026). Transformasi Paradigma Kurikulum di Indonesia Dari Kurikulum 1947 Hingga Kurikulum Merdeka : Transformasi Kurikulum sebagai Respon. 5(2), 507-513. <https://doi.org/10.54259/diajar.v5i2.7061>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024).. 2, 306-312.
- Suherman, U. (2025). Tantangan Dan Solusi Sistem Pengelolaan Dana. *Almuaddib*, 07(01), 90-105. https://www.jurnal.staim-probolingo.ac.id/Muaddib/article/view/1468/1146?utm_source=chatgpt.com
- Sulistiawati, H. (2025). Kebijakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (Anbk) Sebagai Instrumen Evaluasi Mutu Pendidikan Di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 881-889. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.13054>
- Syam, M. A., Idrus, L., Agama, I., Negeri, I., & Selatan, S. (2026). Dinamis : Jurnal Inovasi dan Transformasi Pendidikan Transformasi Pendidikan Islam Di Bawah Kekuasaan Kolonial Belanda. 111-121.
- Yusuf, A., & Hanif, M. (2025). Dampak Desentralisasi Pendidikan terhadap Ketimpangan Akses di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(3), 153-166. <https://jipipi.org/index.php/jipipi153Situswebjurnal:https://jipipi.org/index.php/jipipi>